

## Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM dan Kemiskinan di Kota Langsa

Puja Silvia<sup>1</sup>, Asyura<sup>2</sup>, Renilda<sup>3</sup>, Asnidar<sup>4</sup>, Puti Andiny<sup>5</sup>

<sup>12345</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra, Langsa

Koresponden penulis : [Pujasilvia@gmail.com](mailto:Pujasilvia@gmail.com)

*Abstract.* The purpose of this study was to determine the effect of GDP and government spending on HDI and poverty in the city Langsa. This type of research is quantitative descriptive in which the type of data used is secondary data. This research uses multiple linear regression approach. The results of this study indicate that GRDP has a positive and significant effect on HDI in the city of Langsa, government spending has a positive and insignificant effect on HDI in the city of Langsa, GRDP has a positive and significant effect on poverty levels in the city of Langsa, government spending has a positive and insignificant effect on poverty In city of Langsa, HDI has a negative and insignificant effect on poverty in the city of Langsa. *Keywords:* GRDP, Government Expenditure, HDI and Poverty

*Keywords:* GRDP, Government Expenditure, HDI and Poverty.

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM dan Kemiskinan di Kota Langsa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang dimana jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kota Langsa, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM di Kota Langsa, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Langsa, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Langsa, IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Langsa.

**Kata kunci:** PDRB, Pengeluaran Pemerintah, IPM dan Kemiskinan.

### LATAR BELAKANG

Kemiskinan meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Topik untuk diperdebatkan dalam berbagai forum nasional dan internasional. Internasional meski miskin sendiri telah muncul ratusan tahun yang lalu. Masalah kemiskinan masalah besar dan terus bermunculan di Indonesia. Gagal dalam mengatasi masalah kemiskinan dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam masalah sosial, ekonomi dan politik di tengah masyarakat (Margareni et al.2016). Tujuan yang ingin di raih dari Pembangunan nasional adalah menurunnya tingkat kemiskinan. Kemiskinan menjadi perhatian utama dalam Pembangunan (Alcock, 2012). Kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan yang dialami sekelompok orang sehingga mereka tidak mampu menikmati atau merasakan kesehatan yang layak, pendidikan tinggi dan konsumsi yang kurang layak. Orang miskin tidak memiliki kualitas ini yang menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi juga menjadi rendah. Pendapatan rendah menyebabkan ketidak patuhan pakaian, makanan, dan persediaan yang layak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar agar kenyang tanpa memperhatikan aspek gizi,

menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh, karena itu mereka mudah diserang penyakit. Orang miskin terjebak dalam lingkaran tak berujung disebut lingkaran setan atau vicious circle (Seran, 2017). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang terjadi dari waktu ke waktu lama dan cenderung membaik kualitas kehidupan untuk semua (Ritonga, 2005). Sebagian besar pemerintah dan Organisasi internasional sekarang setuju pentingnya pertumbuhan ekonomi kemajuan dalam pengurangan kemiskinan (Bibi, 2006). Laju pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan PDB tidak mengamati apakah kenaikannya lebih besar atau kecil (Sukirno, 2010). Pertumbuhan ekonomi yang negatif meningkatkan pengangguran dan kemiskinan (Ishengoma dan Robert, 2006). Penggerak kemiskinan terutama didasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi (Fosu, 2010). Salah satu yang menentukan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah misalnya dari sudut pandang keuangan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di tingkat nasional sementara itu produk domestik bruto regional (PDB) mempengaruhi penurunan kemiskinan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikatornya menilai tingkat perkembangan dan adalah salah satu efek nyata keberhasilan beberapa kebijakan ekonomi yang digunakan pada waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat negara di dunia menjadi satu prasyarat yang paling penting untuk memberantas kemiskinan (Gemini, 2013).

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang memiliki kualitas sebagai modal. Diharapkan pemerintah dapat menggerakkan pembangunan sosial ekonomi terhadap penduduk setempat (Akudugu, 2012). Banyak Faktor penyebab kemiskinan yang masih sulit untuk dihilangkan karena kualitas sumber daya manusia masih tergolong rendah. Upaya menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan adalah salah satunya pertumbuhan SDM dan pertumbuhan pendapatan (Joseph dan Sumner, 2015). Todoro (2006) menyatakan bahwa IPM menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia dipertimbangkan dalam hal perluasan, pemerataan dan keadilan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebuah IPM rendah akan mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja penduduk.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS,

2010). PDRB adalah salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi yang biasanya juga digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang.

### **Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Mahmudi ( 2007) , pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pengeluaran pemerintah adalah salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan dalam untuk menstabilkan harga, tingkat out put, kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

### **Teori Indeks Pembangunan Manusia**

UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’choices”). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Todaro (2006) menyatakan bahwa IPM menggambarkan indeks pengembangan manusia yang dilihat dari sisi perluasan, pemerataan, dan keadilan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Rendahnya IPM akan mengakibatkan pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi deprivasi materi dan social yang menyebabkan individu hidup dibawah standar kehidupan yang layak ataupun kondisi dimana individu mengalami deprivasi relative dibandingkan individu lainnya dalam masyarakat. (Hall, A & Midgley, 2014). Menurut Badan Pusat Statistik (2016) kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Kuncoro (2006), mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Todaro, Michael (2000) juga menyatakan bahwa kemiskinan absolut artinya apabila sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau

dibawah garis kemiskinan internasional. Seseorang dapat dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, seperti sandang, pangan, kesehatan, perumahan serta pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja.

## **HUBUNGAN ANTAR VARIABEL**

### **Hubungan antara PDRB dengan IPM**

Dalam hal ini dijelaskan bahwa pembangunan sosial adalah suatu pendekatan pembangunan yang secara khusus mencoba mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berlanjut tanpa pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial seluruh penduduk, peningkatan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja. PDRB merupakan variabel yang dipandang memiliki peranan menggerakkan dan mendorong pembangunan manusia. PDRB dan pembangunan manusia memiliki hubungan secara otomatis, namun apabila kedua hal tersebut disatukan dalam satu kebijakan pembangunan yang searah maka akan tercipta suatu kekuatan yang dapat saling mendorong. Sehingga PDRB akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia (Anggraini dan Muta'ali, 2012). Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapasitas penduduk dan mengarah pada peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Melalui peningkatan produktivitas dan kreativitas, masyarakat dapat menyerap dan mengontrol sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut (Sukirno, 2004) PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan menurut BPS PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan pada sektor-sektor ekonomi. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan belanja publik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM dan belanja pemerintah yaitu ketika PDRB meningkatkan belanja publik juga meningkatkan IPM.

### **Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan IPM**

Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang

dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, dkk 2001). Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik dari segi teknologi maupun kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi atau inovasi teknologi dimungkinkan. Seperti yang diungkapkan Meier dan Rauch, Dikatakan bahwa pendidikan atau, lebih luas lagi, modal manusia dapat mendorong pembangunan.PDRB, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kota Langsa. Sedangkan IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan kata lain apabila apabila IPM meningkat maka kemiskinan akan menurun.

### **Hubungan antara IPM dengan Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu sumber yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator pembangunan daerah yang berkorelasi negatif dengan kemiskinan daerah. Rendahnya IPM berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga,2011). Oleh karena itu, suatu daerah dengan nilai IPM yang tinggi diharapkan idealnya memiliki kualitas hidup masyarakat yang tinggi, atau dapat dikatakan jika nilai IPMnya tinggi maka angka kemiskinannya harus rendah.Melek huruf dan lama rata-rata usia sekolah, yang mengukur keberhasilan pendidikan, dan daya beli masyarakat untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar, biaya rata-rata per penduduk dipandang sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan bidang pendidikan, untuk pengembangan kehidupan yang layak. Peningkatan dalam perawatan kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per orang mendorong pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas penduduk di wilayah tersebut, semakin sedikit penduduk miskin di wilayah tersebut. Pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan adalah negatif dan tidak signifikan, yaitu. jika IPM meningkat, kemiskinan menurun.

### **Hubungan antara PDRB dengan Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan merupakan kondisi atau kebutuhan terpenting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa tambahan kesempatan kerja menyebabkan

ketimpangan distribusi pendapatan tambahan (*ceteris paribus*), yang pada gilirannya menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemiskinan (Tambunu, 2003). Menurut Kuncoro, pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang lebih menitikberatkan pada peningkatan produk nasional bruto suatu provinsi, kabupaten atau kota. Pembangunan ekonomi juga tidak diukur hanya berdasarkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) regional, tetapi harus diperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan yang telah menikmati hasilnya. Bahwa penurunan produk domestik bruto daerah didasarkan pada kualitas dan konsumsi domestik. Dan ketika tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin harus mengubah model makanan pokok mereka menjadi produk yang lebih murah dengan barang yang lebih sedikit.

### **Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Kemiskinan**

Menurut Kuncoro(2000), kemiskinan adalah kegagalan memenuh standar hidup minimum. Masalah standar hidup yang rendah juga terkait dengan pendapatan rendah (kemiskinan), perumahan yang tidak memadai, kesehatan yang buruk dan pelayanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang menyebabkan sumber daya manusia yang rendah dan pengangguran yang tinggi. Tingkat kesehatan yang rendah merupakan salah satu pemicu kemiskinan karena rendahnya tingkat kesehatan masyarakat menurunkan produktivitas. Produktivitas yang rendah terus mendorong pendapatan rendah dan kemiskinan berpenghasilan rendah. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas atau untuk membayar biaya pemeliharaan dan kesehatan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia diharapkan sangat besar. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat investasi, kesempatan kerja, menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan pemerataan pendapatan. Pengeluaran pemerintah adalah salah satu alat yang paling penting untuk mengurangi kemiskinan.

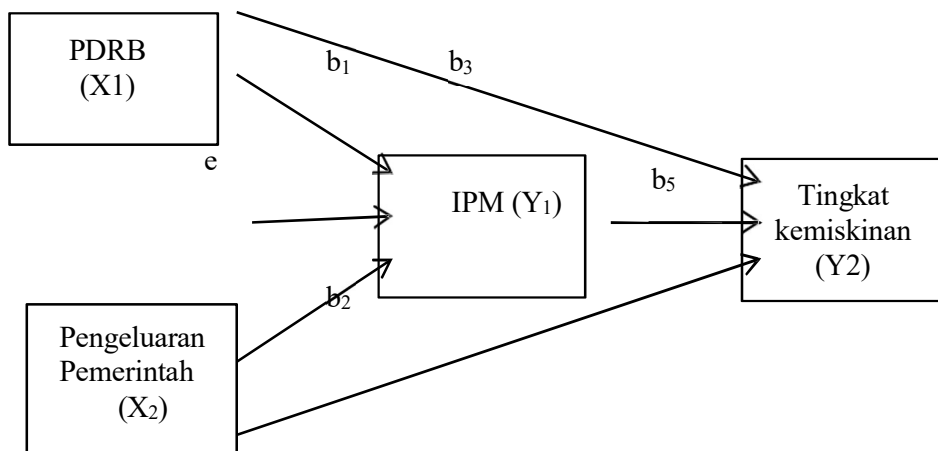
### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena metode tersebut didasarkan pada data kuantitatif ataupun temuan-temuan yang didapat dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau kaidah-kaidah lain dari kuantifikasi (Rahyuda dkk, 2004). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data regional yang berada di kota

Langsa. Yang termasuk objek dalam penelitian ini adalah pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM dan tingkat kemiskinan di kota Langsa. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan juga data kualitatif. Data kuantitatif yang dipakai adalah mencakup jumlah penduduk miskin di kota Langsa, data IPM di kota Langsa, data PDRB dan data pengeluaran pemerintah di kota Langsa. Sedangkan data kualitatif yang dipakai adalah mencakup teori-teori serta penjelasan mengenai PDRB, pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder tersebut bersumber dari BPS kota Langsa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi non dengan meninjau, mencatat serta mempelajari uraian dari buku-buku, artikel, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal dan dokumen-dokumen yang terdapat dari lembaga yang terkait seperti BPS, browsing, dan buku-buku literatur tentang PDRB, pengeluaran pemerintah, IPM dan kemiskinan di kota Langsa.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*Path Analysis*) untuk melihat pengaruh antara variabel-variabel tersebut. Analisis jalur (*Path Analysis*) merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan kausal antar variabel dan juga untuk memperhitungkan kebermaknaan (*magnitude*) hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Untuk menganalisis perhitungan data, akan digunakan alat bantu statistik. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menggunakan teknik analisis jalur (*Path Analysis*). Untuk menganalisis hasil data, digunakan teknik *Path Analysis* dengan menggunakan program SPSS. Persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut:



### **Struktur I**

$$IPM = \beta_1 PDRB + \beta_2 PPM + \text{eror}$$

### **Struktur II**

$$KM = \beta_1 PDRB + \beta_2 PPM + \text{eror}$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (%)

KM = Kemiskinan (%)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (%)

PPM = Pengeluaran Pemerintah (%)

a = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Analisis Jalur Substruktur I**

Dependent Variable: LOG(IPM)

Method:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.672454	0.166103	16.08911	0.0000
LOG(PDRB)	0.099720	0.005054	19.73228	0.0000
LOG(PPM)	0.009544	0.015964	0.597864	0.5688
R-squared	0.991981	Mean dependent var		4.322728
Adjusted R-squared	0.989690	S.D. dependent var		0.022394
S.E. of regression	0.002274	Akaike info criterion		-9.091431
Sum squared resid	3.62E-05	Schwarz criterion		-9.000655
Log likelihood	48.45715	Hannan-Quinn criter.		-9.191011
F-statistic	432.9836	Durbin-Watson stat		2.099263
Prob(F-statistic)	0.000000			



Berdasarkan tabel 1, Anda dapat melihat hasil regresi persamaan substruktur 1 adalah sebagai berikut :

$$\text{IPM} = 0.0997 + 0.099720 \text{ PDRB} + 0.0095 \text{ PPM} + e$$

Hasil persamaan diatas dapat di interpretasi sebagai berikut :

1. Hasil memperkirakan koefisien variabel PDRB ( $X_1$ ), sebesar 0,0997 dan signifikan pada Prob.  $0,0000 < \alpha = 0,05$ . Artinya secara langsung PDRB ( $X_1$ ) secara positif mempengaruhi dan signifikan terhadap IPM ( $Y_1$ ). Jika ada peningkatan PDRB ( $X_1$ ) sebesar satu persen, maka IPM ( $Y_1$ ) di Kota Langsa akan meningkat signifikan sebesar 0,0997 persen. Sebaliknya, jika terjadi penurunan Tingkat PDRB ( $X_1$ ) dari satu persen, maka tingkat IPM ( $Y_1$ ) di kota Langsa akan menurun signifikan sebesar 0,0997 persen dalam Satu tahun, *Ceteris paribus*.
2. Hasil memperkirakan koefisien pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ ), sebanyak 0,0095 dan signifikan pada Prob.  $0,5688 > \alpha = 0,05$ . Artinya secara langsung pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM ( $Y_1$ ). Dalam hal terjadinya peningkatan pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ ) sebesar satu persen maka IPM ( $Y_1$ ) di kota Langsa akan meningkat tidak signifikan oleh 0,0095 persen. Sebaliknya jika itu terjadi penurunan tingkat Pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ ) sebesar satu persen maka tingkat IPM ( $Y_1$ ) di kota Langsa akan menurun secara tidak signifikan sebesar 0,0095persen dalam satu tahun, *ceteris paribus*.
3. Hasil dari perkiraan koefisien determinasi dengan nilai R-Square yang diperoleh 0,991981 atau 99,19% yang menunjukkan kemampuan variabel PDRB dan Belanja Pemerintah dalam menjelaskan variasi yang terjadi di tingkat IPM di kota Langsa sebesar 99,19% sedangkan sisanya 0,81% dipengaruhi oleh variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Analisis Jalur Substruktur II

Dependent Variable: LOG(KM)

Method

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	489.2965	310.6833	1.574904	0.1663
LOG(X1)	16.25777	11.54161	1.408623	0.2086
LOG(X2)	2.747623	4.967336	0.553138	0.6002
LOG(Y1)	-178.5055	114.7133	-1.556101	0.1707
<hr/>				
R-squared	0.400119	Mean dependent var	2.662156	
Adjusted R-squared	0.100178	S.D. dependent var	0.727496	
S.E. of regression	0.690095	Akaike info criterion	2.385200	
Sum squared resid	2.857389	Schwarz criterion	2.506234	
Log likelihood	-7.926002	Hannan-Quinn criter.	2.252426	
F-statistic	1.333992	Durbin-Watson stat	2.385664	
Prob(F-statistic)	0.348394			

Berdasarkan table 2 dapat dilihat hasil regresi persamaan substruktur II sebagai berikut:

$$KM = 16,2577PDRB + 2,7476PPM + 178,5055IPM + e$$

Persamaan diatas dapat di intepretasikan sebagai berikut:

1. Hasil estimasi koefisien variabel PDRB ( $X_1$ ) sebesar 16,2577 dan signifikan pada prob.  $0,2086 > \alpha = 0,05$ . Artinya secara langsung PDRB ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ). Jika terjadi peningkatan PDRB ( $X_1$ ) sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ) di kota Langsa akan meningkat secara tidak signifikan sebesar 16,2577 persen. Sebaliknya jika terjadi penurunan PDRB ( $X_1$ ) sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ) di kota Langsa akan menurun secara tidak signifikan sebesar 16,2577 persen dalam satu tahun, ceteris paribus.
2. Hasil estimasi koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ ) sebesar 2,7476 dan signifikan pada prob.  $0,6002 > \alpha = 0,05$ . Artinya secara langsung Pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ). Jika terjadi peningkatan Pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ ) sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ) di kota Langsa akan meningkat secara tidak signifikan sebesar ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ). Jika terjadi peningkatan Pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ ) sebesar satu persen,

- maka tingkat kemiskinan (Y2) di kota Langsa akan meningkat secara tidak signifikan sebesar 2,7476persen. Sebaliknya jika terjadi penurunan Pengeluaran Pemerintah sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan (Y2) di kota Langsa akan menurun secara tidak signifikan sebesar 2,7476persen dalam satu tahun, *ceteris paribus*.
3. Hasil estimasi koefisien variabel IPM (Y1) sebesar -178,5055 dan signifikan pada  $\text{prob. } 0,1707 > \alpha = 0,05$ . Artinya secara langsung IPM (Y1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y2). Jika terjadi peningkatan IPM (Y1) sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan (Y2) di kota Langsa akan menurun secara tidak signifikan sebesar 178,5055persen. Sebaliknya jika terjadi penurunan IPM (Y1) sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan (Y2) di kota Langsa akan secara tidak signifikan sebesar 178,5055 persen dalam satu tahun, *ceteris paribus*. Sebaliknya jika terjadi penurunan Pengeluaran Pemerintah sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan (Y2) di kota Langsa akan menurun secara tidak signifikan sebesar 178,5055persen dalam satu tahun, *ceteris paribus*.

## **Hasil Pengujian Analisis Jalur**

### **1. Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hipotesis pertama adalah PDRB akan berdampak signifikan terhadap IPM di Kota Langsa. Besarnya pengaruh PDRB terhadap IPM adalah sebesar 0,0997 yang memiliki nilai probabilitas yang signifikan. Jika  $0,0000 < 0,05$  maka hipotesis diterima dalam penelitian ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kota Langsa. Artinya, kenaikan Produk Domestik Bruto sebesar 1% menghasilkan kenaikan yang signifikan sebesar 0,0997% dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori Kuznet bahwa salah satu ciri pertumbuhan ekonomi modern adalah output per kapita (Todaro, 2008).

### **2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM di kota Langsa. Besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sebesar 0,0095 dengan probabilitas signifikan.  $0,5688 > \alpha = 0,05$  maka hipotesis penelitian ini ditolak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM di kota Langsa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dya Ayu (2020) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan dampak yang signifikan. Artinya, jika pengeluaran pemerintah meningkat sebesar

1 persen, tidak akan meningkat secara signifikan sebesar 0,0095 persen karena variabel lainnya tetap.

### **3. Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan pernyataan hipotesis ketiga, PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kota Langsa. Ukuran efek PDRB adalah 16,25777, yang tidak signifikan.  $0,2086 > \alpha = 0,05$  maka hipotesis penelitian ini ditolak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kota Langsa. Artinya, jika PDB meningkat sebesar 1 persen, maka tidak akan meningkat secara signifikan sebesar 16,25777 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil penelitian ini menolak penelitian Lintang (2015) bahwa tinggi rendahnya PDRB kota Surakarta tidak berpengaruh terhadap kemiskinan kota Surakarta Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan. Syahur Romi & Etik Umiyati (2018) dengan judul Kajian Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi. Selain itu, penelitian Ambok Pangiuk (2018) yang hasil penelitiannya juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap kemiskinan.

### **4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Hipotesis keempat menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kota Langsa. Besarnya efek pengeluaran pemerintah adalah 2,7476, yang tidak signifikan terhadap probabilitas.  $0,6002 > \alpha = 0,05$  maka hipotesis penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini membantah hasil penelitian Dya Ayu (2020) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. tingkat kemiskinan kota Langsa. Artinya, jika pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 persen, maka tidak akan meningkat secara signifikan sebesar 2,7476 persen, dengan variabel lain konstan.

### **5. Pengaruh IPM terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan pernyataan hipotesis kelima, IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kota Langsa. Ukuran efek HDI adalah -178,5055, yang tidak signifikan.  $0,1707 > \alpha = 0,05$  maka hipotesis ditolak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kota Langsa. Artinya, jika IPM naik 1 persen, maka akan turun tidak signifikan sebesar 178,5055 persen, dengan asumsi variabel

lain konstan. Hasil penelitian ini menolak penelitian Yuliant (2016) yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi DIY, artinya peningkatan IPM menurunkan kemiskinan di provinsi DIY menjadi. Begitu pula dengan penelitian Syaifullah & Nazaruddin (2017) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan peningkatan IPM menjadi indikasi kualitas sumber daya manusia yang tinggi, yang kemudian diterjemahkan menjadi efek peningkatan produktivitas tenaga kerja terhadap pendapatan, dengan lebih tinggi pendapatan meningkat, membuat sumber daya manusia ini lebih mampu memenuhi kebutuhan mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan.

### **Pengaruh Langsung (Direct Effect), Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) dan Pengaruh Total (Total Effect)**

Berikut ini hasil Pengaruh langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total: Tabel Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Antara Variabel

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y <sub>1</sub>	
X <sub>1</sub> - Y <sub>1</sub>	0,0997		0,0997
X <sub>2</sub> - Y <sub>1</sub>	0,0095		0,0095
X <sub>1</sub> - Y <sub>2</sub>	16,2577	-17,7970	1,5393
X <sub>2</sub> - Y <sub>2</sub>	2,7476	-1,6958	1,0518
Y <sub>1</sub> - Y <sub>2</sub>	-178,5055		-178,5055

Besarnya nilai error pada masing masing pengaruh variabel independen terhadap dependen melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\beta_e = 1 - R \text{ Square}$$

$$\beta_{e1} = 1 - 0,9919 = 0,0081$$

$$\beta_{e2} = 1 - 0,4001 = 0,5999$$

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara variabel terbentuk model koefisien analisis jalur. Adapun persamaan substruktur dapat menjadi model koefisien analisis jalur, yaitu

sebagai berikut:

Persamaan Substruktur I:

$$Y_1 = 0,0997Y_1X_1 + 0,0095Y_1X_2 + 0,0081\varepsilon_1$$

Persamaan Substruktur II:

$$Y_2 = 16,2577Y_2X_1 - 178,5055Y_2Y_1 + 0,5999\varepsilon_2$$

Dalam teori trimming pengujian validitas model riset diamati melalui perhitungan koefisien determinasi total sebagai berikut :

$$Rm^2 = 1 - (0,0081^2) (0,5999^2)$$

$$= 1 - (0,00006561) (0,35988001)$$

$$= 1 - 0,00002361172$$

$$= 0,99997638828$$

$$= 99,99 \%$$

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM dan pengeluaran pemerintah, dengan kata lain apabila PDRB, pengeluaran pemerintah meningkat, maka IPM ikut pula meningkat. 2) PDRB, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kota Langsa. Sedangkan IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan kata lain apabila apabila IPM meningkat maka kemiskinan akan menurun. 3) IPM memediasi secara inconsistent variabel PDRB, pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan pada kota Langsa.

## **REFERENSI**

- Akudugu, Jonas Ayaribilla. 2012. Accountability in local Government Revenue management: who does what?. *Journal of Sustainable Development*. 2(2).
- Alcock, Pete. 2012. Poverty and Social Exclusion. *The Student's Companion To Social Policy*. Fourth Edition, pp: 26-186.
- Ambok Panguik, 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan di

- provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Anggraini, R.A, & Muta'ali, L. (2012). Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(3), 233-242.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke-5 Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kendal Tahun 2010*. Badan Pusat Statistik Press. Kendal.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2021. *Indeks Pembangunan Manusia: Badan Pusat Statistik Kota Langsa*.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2021. *Jumlah Penduduk Miskin: Badan Pusat Statistik Kota Langsa*.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2021. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Kota Langsa: Badan Pusat Statistik Kota Langsa*.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2021. *Pengeluaran Pemerintah. Langsa: Badan Pusat Statistik Kota Langsa*.
- Bibi, Sami. 2006. *Growth With Equity is Better For the Poor*. Working Paper 06-40. Centre Interuniversitaire Sur Le Risque.
- Blankeanu WF, Simpson NB. 2004. *Public Education Expenditures and Growth*. *Journal of Development Economics*, 73: 583-605.
- Christiaensen, Luc, Lionel Demery, Jesper Kuhl. 2011. *The Evolving Role of Agriculture in Poverty Reduction – An Empirical Perspective*. Elsevier: *Journal of Development Economics* Vol. 96.
- Cliff Laisina, Vecky Masinambow, Wensy Rompas (2015), *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara*. 194.
- Desi Yulianti. (2016). *Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta*.
- Dya Ayu Fitaloka Candra Kartika (2020), *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Angka Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan IPM di Provinsi Bali*. 15.
- Eigbiremolen, Anaduaka. 2014. *Human Capital Development and Economic Growth: The Nigeria Experience*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. 4(4):12-14.
- Fosu, Augustin Kwasi. 2010. *Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence*. CSAE Working Paper WPS, 07.
- Hall, A & Midgley, J. (2014). *Social Policy For Development*.
- Ishengoma, Esther K. And Robert Kappel. 2006. *Economic Growth and Poverty: Does Formalisation on Informal Enterprises Matter*. GIGA Working Papers, GIGA-WP-20.
- Kembar, Made. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 6 No. 1.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*.

- Lanjouw, P., Pradhan M., Saadah F., Sayed H., Sparrow R., 2011. Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?. World Bank Working Paper, No. 2739. World Bank. Washington D.C.
- Lintang. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kota Surakarta Tahun 1995-2013. Skripsi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Made Ade Dwi Ariwuni dan I Nengah Kartika (2019, desember), Pengaruh PDRB dan Pengeluaran pemerintah terhadap IPM Dan tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Bali. 2935.
- Mahmudi.2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Margareni, dkk. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. Jurnal Piramida, Vol. XII No. 1 : 101 – 110.
- Oluwatobi, Stephen O. 2011. Government Expenditure on Human Capital Development Implications for Economic Growth in Nigeria. Journal Of Sustainable Development. Vol. 4 No.3 June 2013.
- Rahyuda, I Ketut, dkk. 2004. Metodologi Penelitian. Dalam Buku Ajar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Ritonga, JhonTafbu. 2005. Economic Growth And Income Distribution: The Experience of Indonesia. Jurnal Ekonomi Malaysia, 39, h: 89-105.
- Ryan Ezkirianto dan Muhammmad Findi A (2013), Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Per Kapita di Indonesia, 14 15.
- Sayifullfah dan Tia Ratu Gandasari (2016), Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten (243).
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 10 No. 2.
- Shinta Wulan Dari & Asnidar (2022), Pengaruh kepadatan penduduk, Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Terhadap kriminalitas.68-73.
- Situmorang, Marojahan. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2012. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sukirno, sadono. 2004. Makroekonomi Modern, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukirno, S. 2010. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmaraga, Prima. 2011. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Tengah. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro.
- Sukmaraga, Prima. 2011, Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi jawa Tengah. FE UNDIP- Semarang.
- Syaifullah A. & Nazaruddin Malik. (P2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4. Jurnal Ilmu Ekonomi , Vol 1 Jilid 1/2017 Hal 107-119.
- Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia.



Todaro, Michael, P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (7th ed.).

Todaro, Michael P, Stephen C Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Todaro, M. (2008). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi 9*. Jakarta: Erlangga.

Yusuf dan Sumner. 2015. *Growth, Poverty, And Inequality under Jokowi*. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 51:3, 323-348.